

ABSTRAK

MANAJEMEN KONFLIK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) REGIONAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RUWEISHA

Pengelolaan sampah di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan praktik *open dumping* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Untuk mengatasinya Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pembangunan TPA Regional di Desa Tanjung Sari, Lampung Selatan sejak tahun 2019. Rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung dengan pendekatan kualitatif dalam desain studi kasus untuk memahami dinamika konflik dan strategi penyelesaiannya. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan tahapan manajemen konflik Stevenin (1997), menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan yang buruk, terutama akibat ketiadaan dokumen AMDAL untuk menilai dampak lingkungan dan kesehatan. Kurangnya transparansi, dan lemahnya komunikasi yang memperburuk kepercayaan publik terhadap proyek. Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat, komunikasi langsung, keterbukaan informasi, kompensasi adil, serta edukasi dan studi banding. Secara teknis, pemilahan sampah dari sumber dan penerapan teknologi ramah lingkungan sangat penting untuk efektivitas pengelolaan sampah. Di sisi kebijakan, penyusunan AMDAL merupakan dasar untuk pembangunan yang bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, komunikasi yang konsisten, dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan FGD sebelumnya tidak efektif dalam menyelesaikan konflik karena belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, TPA Regional, Manajemen Konflik

ABSTRACT

CONFLICT MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL FINAL PROCESSING SITE (TPA) IN LAMPUNG PROVINCE

By

RUWEISHA

Waste management in Lampung Province faces significant challenges, particularly regarding open dumping practices at the Final Disposal Site (TPA), which negatively impact the environment and public health. To address this, the Lampung Provincial Government has planned the construction of a Regional TPA in Tanjung Sari Village, South Lampung, since 2019. However, the plan has faced strong opposition from the local community. This study aims to analyze conflict management in the development of the Regional TPA in Lampung Province using a qualitative case study approach to understand the dynamics of the conflict and its resolution strategies. Based on Stevenin's (1997) conflict management stages, the findings reveal that the conflict was triggered by public concerns about poor management, primarily due to the absence of an Environmental Impact Assessment (AMDAL) document to evaluate environmental and health risks. A lack of transparency, and weak communication further eroded public trust in the project. Conflict resolution requires an integrated approach involving the community, direct communication, information transparency, fair compensation, education, and benchmarking. Technically, waste segregation at the source and the implementation of environmentally friendly technologies are essential for effective waste management. From a policy perspective, preparing AMDAL is key to responsible and sustainable development. The success of the implementation is highly dependent on cross-sector coordination, consistent communication, and continuous evaluation. The evaluation indicates that previous Focus Group Discussions (FGDs) were ineffective in resolving the conflict as they failed to accommodate the community's aspirations fully.

Keywords: Waste Management, Regional TPA, Conflict Management